



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

**TAHUN
2026**



<https://kominfo.pacitankab.go.id/id> 

@diskominfopacitan 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 telah selesai disusun sesuai dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada Tingkat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan organisasi dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Pacitan, Agustus 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19761015 1996022 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026, yang merupakan masa transisi dari berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 menuju RPJMD selanjutnya.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Maka penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, Lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Pacitan akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Pacitan. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tema : PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DAN
KEBERDAYAAN SOSIAL

Dari tema rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pacitan diatas telah ditentukan prioritas program Pembangunan yang meliputi :

1. Memperkuat kemandirian ekonomi lokal;
2. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan;
3. Memperkuat industri olahan yang berpotensi ekspor;
4. Penguatan society 5.0 dalam partisipasi;
5. Memperkuat kemandirian sosial dan layanan dasar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ;
- 22) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- 23) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan;
- 24) Surat Edaran Nomor : 000.7.6.1/843/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk satu periode Tahun Anggaran, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Sedangkan Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah:

- a. Menjadi pedoman bagi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.
- b. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program pelayanan publik.

- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dan Surat Edaran Nomor : 000.7.6.1/843/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten
Pacitan.

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.143.368.517,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.932.301.696,- atau sebesar 97,05%, sisa anggaran sebesar Rp. 211.066.821,-. Dengan rincian sebagai berikut untuk anggaran belanja operasional sebesar Rp. 6.911.598.697,- terealisasi sebesar Rp. 6.701.719.496,- atau 96.96 % dan anggaran modal sebesar Rp. 231.769.820,- terealisasi sebesar Rp. 230.582.200,- atau 99,49 % yang dijabarkan dalam 5 program 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu dapat dilihat pada table.2.1 di bawah :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12 = (8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		
1	216.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	77,66	0	70,40	1.445.275.913,00	76,86	4.451.860.017,00	0	679.201.388,00	0	1.178.831.661,00	72	1.009.573.296,00	0	1.396.466.574,00	72,3	4.264.072.919,00	94,07	93,78	142,7	5.709.348.832,00	183,75	0
	216.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Dok	23,00	25.750.000,00	23,00	21.177.900,00	23	33.432.000,00	5	3.000.000,00	5	9.808.200,00	6	0	7	19.958.250,00	23	32.766.450,00	100	98,01	46	53.944.350,00	200	209,49
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	13.750.000,00	9,00	19.808.200,00	9	21.860.000,00	3	3.000.000,00	3	4.331.200,00	3	0	3	14.428.000,00	9	21.759.250,00	100	99,34	18	32.567.400,00	204	276,83
	216.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Laporan	14,00	12.000.000,00	14,00	19.369.700,00	14	11.572.000,00	2	0	2	5.477.000,00	3	0	3	5.530.250,00	12	11.007.250,00	85,71	95,12	24	21.376.950,00	185,71	178,14
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan (%)																		92,86	97,33							
Predikat kinerja (%)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2				
	216.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dok	59,00	65.000.000,00	59,00	283.491.320,00	59	2.661.489.717,00	13	440.330.774,00	16	863.094.499,00	15	597.091.938,00	13	624.881.925,00	57	2.525.399.136,00	96,61	94,89	116	2.808.890.456,00	196,61	4321,37
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21,00	0	24,00	226.426.420,00	21	2.605.149.717,00	21	434.430.774,00	21	860.251.499,00	20	581.677.038,00	20	603.188.485,00	20	2.466.548.696,00	95,24	94,79	44	2.695.975.416,00	204,52	0
	216.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RKPD	Laporan	1,00	15.000.000,00	2,00	5.416.700,00	1,00	7.725.000,00	0	0	0	3.993.000,00	0	0	1	3.484.060,00	1	7.477.060,00	100	96,79	3	12.893.700,00	300	85,96
	216.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD	Laporan	36,00	50.000.000,00	41,50	51.648.005,00	36	48.615.000,00	11	5.405.000,00	10	8.850.000,00	10	15.414.000,00	3	18.209.440,00	34	48.353.440,00	94,44	99,5	73	100.021.440,00	208,33	206,04
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan (%)																		96,56	97,83							
Predikat kinerja (%)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3				

216.01.2.06	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Prosentase Pemasangan yang ditetapkan dalam penggunaan	%	100.00	15.500.000,00	100.00	123.413.200,00	100	172.468.575,00	100	41.640.900,00	24.9	2.420.000,00	24.9	4.386.000,00	24.3	123.507.000,00	25	436.000,00	99	171.920.900,00	99	99.69	199	295.337.100,00	199	190.64
216.01.2.06.002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	10.000.000,00	55.00	15.000.000,00	1.00	40.254.575,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	38.000.000,00	1	0	0	40.000.000,00	200	99.69	199	64.131.500,00	199	64.131
216.01.2.06.005	Monitoring Belanja dan Pembelian	Jumlah Dokumen Monitoring Belanja dan Pembelian	Dokumen	0.00	5.500.000,00	20.00	10.000.000,00	20.00	10.000.000,00	20.00	31.250.000,00	1	2.420.000,00	1	4.386.000,00	1	84.800.000,00	1	4.386.000,00	3	122.917.400,00	15	99.77	199	201.205.600,00	199	420.74
216.01.2.06.009	Monitoring Belanja dan Pembelian	Jumlah Dokumen Monitoring Belanja dan Pembelian	Dokumen	0.00	5.500.000,00	20.00	10.000.000,00	20.00	10.000.000,00	20.00	31.250.000,00	1	2.420.000,00	1	4.386.000,00	1	84.800.000,00	1	4.386.000,00	3	122.917.400,00	15	99.77	199	201.205.600,00	199	420.74
Rata-rata Laporan Kinerja Per Outing																											
Prediksi Kinerja																											
216.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemasangan yang ditetapkan dalam penggunaan	%	100.00	253.750.000,00	100.00	172.633.944,00	100	650.684.036,00	100	69.739.056,00	24.9	39.820.610,00	24.9	403.792.756,00	24.3	123.578.800,00	25	403.792.756,00	99	636.331.012,00	99	97.78	199	808.844.956,00	199	318.76
216.01.2.06.001	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	7.750.000,00	1.00	3.450.750,00	1.00	6.450.750,00	1.00	2.550.750,00	1	2.550.750,00	1	750.000,00	1	3.000.000,00	1	750.000,00	1	6.441.950,00	100	97.78	199	10.750.750,00	199	10.750
216.01.2.06.002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	10.000.000,00	0.00	33.450.750,00	0.00	55.200.000,00	0.00	15.740.956,00	1	15.740.956,00	1	17.046.500,00	1	18.285.125,00	1	17.046.500,00	1	54.101.440,00	87.5	97.77	199	87.054.000,00	199	87.054
216.01.2.06.004	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	30.000.000,00	0.00	30.889.750,00	0.00	37.460.150,00	0.00	10.794.600,00	0	10.794.600,00	0	12.599.600,00	1	13.093.000,00	1	12.599.600,00	3	37.397.550,00	100	97.78	199	75.160.000,00	199	75.160
216.01.2.06.005	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	9.000.000,00	0.00	14.929.980,00	0.00	31.071.000,00	0.00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	30.980.000,00	0	30.980.000,00	3	30.980.000,00	100	97.77	199	45.971.000,00	199	45.971
216.01.2.06.009	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Ambul	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Ambul	Pekerja	0.00	100.000.000,00	100.00	82.300.750,00	100.00	520.400.000,00	100.00	9.754.450,00	0	9.754.450,00	0	34.150.750,00	0	86.750.750,00	0	34.150.750,00	15	510.347.400,00	100	97.78	199	590.850.000,00	199	420.74
Rata-rata Laporan Kinerja Per Outing																											
Prediksi Kinerja																											

216.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Usaha Pemeliharaan Daerah	Proentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	100,00	20.000.000,00	99,75	68.626.000,00	100	61.945.320,00	25	23.528.600,00	24,9	0	24,3	0	25	0	24,3	31.502.000,00	99	61.030.600,00	99	98,52	198,8	129.657.400,00	198,75	646,29
216.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lampu	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lampu yang disediakan	Unit	5,00	20.000.000,00	15,00	68.626.000,00	5,00	61.945.320,00	2	23.528.600,00	0	0	0	0	1	0	0	31.502.000,00	0	61.030.600,00	100	98,52	19	129.657.400,00	381	646,29
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan																											
Prediksi Kinerja																											
216.01.2.08	Pengadaan Jasa Peningkatan Usaha Pemeliharaan Daerah	Proentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	%	100,00	343.000.000,00	99,80	569.859.929,00	100	650.684.849,00	25	158.904.003,00	24,9	157.345.746,00	25	147.680.263,00	24,3	156.071.638,00	99	620.001.660,00	99	98,28	198,8	1.189.361.589,00	198,8	346,9		
216.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sertifikasi dan Instalasi	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sertifikasi, dan Instalasi yang disediakan	Laporan	12,00	343.000.000,00	12,00	569.859.929,00	12	133.390.949,00	3	30.380.755,00	3	28.200.526,00	3	24.656.645,00	3	30.405.660,00	12	112.566.660,00	100	84,15	29	215.681.349,00	200	150,97		
216.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12,00	200.000.000,00	12,00	466.294.713,00	12	517.285.500,00	3	128.521.016,00	3	123.520.716,00	3	122.487.266,00	3	127.665.940,00	12	507.656.620,00	100	98,15	29	973.980.340,00	200	148,99		
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan																											
Prediksi Kinerja																											
216.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Usaha Pemeliharaan Daerah	Proentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80,00	126.000.000,00	79,38	206.072.620,00	80	221.159.520,00	16	11.197.401,00	30	37.203.350,00	18	18.415.495,00	14	149.904.015,00	78,3	216.720.161,00	97,88	97,99	157,9	422.792.981,00	197,35	335,59		
216.01.2.09.0002	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Laporan yang Dipekai dan Diberikan Pakai dan Pemenuhannya	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Laporan yang Dipekai dan Diberikan Pakai dan Pemenuhannya	Unit	25,00	75.000.000,00	24,00	109.807.600,00	25,00	105.800.320,00	5	6.165.401,00	9	37.033.350,00	3	6.025.000,00	6	72.307.600,00	25	121.901.450,00	100	96,9	47	231.759.650,00	204,35	328,95		
216.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lampu	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lampu yang Dipekai	Unit	30,00	165.000.000,00	30,00	38.767.222,00	30,00	36.689.000,00	9	5.036.000,00	13	0	5	0	9	11.510.700,00	36	16.840.300,00	97,3	98,11	66	34.667.200,00	175,38	241,3		
216.01.2.09.0009	Pemeliharaan Perbaikan, Delang Kantor dan Bagian Lampu	Jumlah Delang Kantor dan Bagian Lampu yang Dipekai dan Diberikan	Unit	1,00	35.000.000,00	1,00	58.195.000,00	1	78.492.200,00	0	0	0	0	1	12.392.005,00	0	65.685.715,00	1	78.756.000,00	100	99,72	2	138.476.000,00	200	380,99		
Rata-rata capaian kinerja Per Subkegiatan																											
Prediksi Kinerja																											
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan																											
Prediksi Kinerja																											

2	216.02	PROGRAM PEMBELAJAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	83	0	81.03	622.240.680,00	75,00	887.000.000,00	15	16.427.000,00	20	284.521.512,00	25	100.960.939,00	30	479.404.500,00	90	881.313.951,00	120	99,36	171	1.503.554.631,00	201,21	0
	216.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89,00	1.356.191.447,00	89,17	622.240.680,00	83,00	887.000.000,00	15	16.427.000,00	25	284.521.512,00	30	100.960.939,00	20	479.404.500,00	90	881.313.951,00	108,43	99,36	179,2	1.503.554.631,00	201,21	110,87
			100,00	1.356.191.447,00	109,00	622.240.680,00	100,00		42		0		0	0	0	42		42		151	622.240.680,00	151	45,33	
		Prosentase kuantitas informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%																					
		Prosentase kuantitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menerima informasi dan kebijakan pemerintah	%	84,00	1.356.191.447,00	44,52	622.240.680,00	64,00	0	0	0	0	0	0	0	44,52	0	0	0	44,52	622.240.680,00	53	45,33	
	216.02.01.002	Monitoring Opin dan Aspirasi Publik	12,00	76.191.447,00	33,00	68.722.500,00	12	115.200.000,00	3	11.077.000,00	3	49.673.800,00	3	28.692.270,00	3	28.548.500,00	12	113.136.500,00	100	99,64	45	183.881.000,00	275	241,34
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opin dan Aspirasi Publik	Dokumen																					
	216.02.01.004	Pengelolaan Konten dan Pemantauan Media Komunikasi Publik	12,00	410.000.000,00	31,40	129.794.800,00	12	117.055.000,00	3	0	3	31.201.102,00	3	3.075.000,00	3	82.036.300,00	12	116.994.120,00	100	99,42	278	249.739.210,00	271,65	80,18
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Pemantauan Media Komunikasi Publik	Dokumen																					
	216.02.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12,00	150.000.000,00	0,00		12,00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	149.971.000,00	0	149.971.000,00	0	99,98	0	149.971.000,00	1	99,98
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen																					
	216.02.01.006	Pengelolaan Informasi Publik	12,00	220.000.000,00	276,00	51.119.000,00	12	160.770.000,00	3	1.480.000,00	3	126.686.500,00	3	27.920.750,00	3	19.986.800,00	12	156.686.000,00	100	99,08	288	277.499.060,00	240	94,20
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen																					
	216.02.01.007	Layanan Hubungan Media	12,00	500.000.000,00	125,00	372.334.350,00	12	343.375.000,00	3	3.870.000,00	3	96.460.000,00	3	41.100.000,00	3	201.200.000,00	12	943.130.000,00	100	99,93	137	715.454.350,00	111,67	143,09
		Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan																					
Rencana Anggaran Biaya Per Sub-Magang																							80	99,97
Rencana Anggaran Biaya Per Sub-Magang																							80	99,97
Rencana Anggaran Biaya Per Sub-Magang																							80	99,97

[illegible]

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika , indikator adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target 60 % terealisasi 41 %, tingkat capainnya sebesar 68,33 % , belum tercapainya target tersebut dikarenakan topologi jaringan antar OPD yang jauh serta keterbatasan anggaran yang dikelola. Program tersebut di dukung dengan 2 kegiatan yaitu 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo terealisasi 41 % (98,91%), belum sesuai dengan target yang ditetapkan, dan 2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja adalah Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik dengan realisasi 41 % (98,89 %) belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota, dengan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 72,30 dari target 77.66, hasil tersebut diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurang optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatanya untuk perencanaan kedepannya, belum

optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan efektifitas efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja. Program tersebut didukung 7 kegiatan yaitu 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan target 75 % terealisasi 143,08%, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 indikator yaitu :

1. Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP Kabupaten/Kota dengan target 83 % terealisasi 100 %
2. Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dengan target 100 % terealisasi sebesar 100 %.
3. Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dengan target 64 % terealisasi 88,88 %.

b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, indicator kinerja

adalah persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah targetnya 100 % dan terealisasi 100 %. Di dukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerja adalah jumlah kompilasi statistic sectoral yang terdigitalisasi tercapai 14 OPD sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
 - a. Topologi jaringan antar OPD yang jauh serta keterbatasan anggaran yang dikelola,
 - b. Kurang optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

Analisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjabarkan capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan Tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan dengan format tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kominfo				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
1.	Indikator Sasaran Presentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		V	64,52	7,50	100	100	87,50	87,50	100	Terpenuhi
2.	Indikator Program Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		V	70	75	80	85	111	90	85	Terpenuhi
3.	Indikator Kegiatan Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP		V	81	83	86	89	120,5	100	89	Terpenuhi
4	Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		V	100	100	100	100	187,80	100	100	Terpenuhi

5	Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah		V	54	64	74	84	91,83	88,8	84	Terpenuhi
6	Indikator Program Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V	50	60	65	70	41	41	70	Belum terpenuhi
7	Indikator Kegiatan Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo		V	45,16	64,52	83,87	100	41	41	100	Terpenuhi namun belum optimal
8	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		V	12,50	25	31,25	37,5	12,05	100	37,5	Terpenuhi
9	Indikator Program Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam		V	100	100	100	100	100	100	100	Terpenuhi

	menyusun perencanaan pembangunan daerah										
10	Indikator Program Tingkat keamanan informasi pemerintah		V	33	49	65	81	18,75	49	81	Terpenuhi
11	Indikator Kegiatan Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah		V	20	27,27	33,33	38,46	20	20	38,46	Terpenuhi

Bahwa dari table di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo dan Informatika dari 11 indikator terdapat 1 indikator sasaran yang belum terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

Adapun isu – isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo selama satu tahun berjalan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tantangan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kemenpan RB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Dalam rangka peningkatan dan penerapan SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo tetapi bersama dengan Perangkat Daerah lain Di Kabupaten Pacitan. Namun demikian masih terdapat perbedaan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan teknologi berbasis SPBE, sehingga transformasi digital memerlukan tata kelola sistem pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana amanat pemerintah pusat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu terus mengembangkan diri baik dari sisi penyediaan SDM, infrastruktur dan suprastruktur. Pengembangan SDM, regulasi dan

infrastruktur pendukung SPBE

Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Publik

Masih adanya kesenjangan akses informasi di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan. Padahal dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan penguatan portal informasi digital pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi yang relevan dan tepat waktu, serta Implementasi layanan komunikasi publik berbasis teknologi yang dapat menjangkau kelompok marjinal dan difabel.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui program dialog talk show, siaran langsung wayang kulit, iklan layanan masyarakat. Sedangkan media radio melalui program dialog khusus, sementara media luar ruangan dalam berbentuk baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-umbul.

Melalui SP4N Lapor yang merupakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, dimana layanan ini sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif, dimana dapat mengadukan, melaporkan, mengkritisi, ataupun memberikan masukan tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan. Dinas Kominfo sebagai admin Kabupaten yang akan mengirimkan laporan aduan kepada instansi terkait. Selama Januari – Desember 2024 aduan yang masuk sebanyak 32 aduan dari berbagai jenis aduan seperti

infrastruktur jalan, ekonomi dan keuangan, pertanian dan peternakan, administrasi kependudukan

2. Urusan Statistik

Belum Optimalnya Implementasi Satu Data Kabupaten Pacitan

Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai walidata sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan yang memiliki beberapa tugas antara lain: melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi metadata lintas sektoral, mengelola Portal Satu Data, melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data, memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Walidata Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan Pembina Data.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan untuk pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berkoordinasi dengan Koordinator Data dan Pembina Data melalui Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Data yang tersimpan di masing-masing perangkat daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data, bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yang lebih tepat dan akurat. Sayangnya semua perangkat daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data, karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan

implementasi satu data.

3. Urusan Persandian

Penguatan persandian untuk pengamanan informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Penyelenggara pelayanan publik terus mengalami perkembangan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman keamanan informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja penyelenggara pelayanan publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability). Adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengamanan data dan informasi

Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik pasal 26 berbunyi bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (Pemerintah Kabupaten Pacitan) wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan pengamanan sistem elektroniknya. Pengamanan Informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberikan peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan

pemerintahan seperti Mobile internet, Cloud Computing, Big Data dan Internet of Thing (IoT), sehingga berdasarkan peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Urusan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Daerah pada pasal 22 terdapat 16 (enam belas) layanan yang bisa dilakukan Pemerintahan Kabupaten Pacitan pada saat ini dalam pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik diantaranya layanan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik). Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menggunakan layanan sertifikat elektronik untuk menjaga keutuhan, keauntetikan dan nirpenyangkalan. Layanan sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik sudah diadopsi di aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang merupakan aplikasi surat menyurat.

4. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, bidang statistik dan bidang persandian di perangkat daerah, baik yang ASN maupun non ASN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan TA 2026, telah mempertimbangkan visi misi kepala daerah serta kebijakan internal Pemerintah Kab.Pacitan dan juga dilakukan proses membandingkan (review) antara Rancangan Awal RKPD TA 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian dengan ketersediaan anggaran / pagu indikatif Tahun 2026. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pacitan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

N O	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			TARGET	Kebutuhan Dana	
1	3	4	8	9	10	14		15	16	17
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.206.726.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.165.496.890,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.206.726.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.165.496.890,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.666.726.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.946.233.899,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.791.726.000,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	4.069.663.269,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13 Dokumen	150.000.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen	51.500.300,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	35.806.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.694.300,00	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	3.057.725.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2.911.235.160,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	3.000.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.845.596.960,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	7.725.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.736.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57 Laporan	55.902.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %	300.000.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %	124.348.000,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16.068.000,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	108.280.000,00	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	339.000.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	225.436.369,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	70.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.975.700,00	Perubahan target dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.875.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.775.669,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.810.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	60.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	50.686.400,00	
Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.266.200,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.420.200,00	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	750.000.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	595.327.040,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.799.240,00	Perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.527.800,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %	135.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %	111.030.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	46.050.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.880.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	52.100.000,00	

2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.666.000.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	1.207.671.232,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1700 Informasi	1.565.000.000,00		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1650 Informasi	1.207.671.232,00	
	Relasi Media					Relasi Media				
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dinas pers, dan 2 terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3 aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dinas pers, dan 2 terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3 aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	300.000.000,00
	Pelayanan Informasi Publik					Pelayanan Informasi Publik				
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	35.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		25 Permohonan	51.506.232,00	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	30.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	50.220.000,00
	Diseminasi Informasi					Diseminasi Informasi				
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	500.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	201.945.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36 Media	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36 Media	400.000.000,00
	Penyusunan Konten					Penyusunan Konten				
		Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	204.000.000,00

3,	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.200.000.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	1.668.999.398,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Layanan	100.000.000,00		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Layanan	70.500.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen		100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen		70.500.000,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	33 Perangkat Daerah 990 Mbps	2.100.000.000,00		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	29 Perangkat Daerah 870 Mbps	1.598.499.398,00	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen		400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen		181.060.000,00	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				
	-	33 Perangkat Daerah		1.500.000.000,00	-	-	29 Perangkat Daerah		1.055.214.398,00	
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi		200.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi		362.225.000,00	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			625.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			211.320.991,00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			625.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-		211.320.991,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	882 Data	625.000.000,00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	774 Data	211.320.991,00	
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90%	100.000.000,00
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90 %	325.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90%	111.320.991,00
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	12 Laporan	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	50.000.000,00

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			25.000.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			7.942.000,00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			25.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	7.942.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	9 Layanan	25.000.000,00		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Layanan	7.942.000,00	Perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	25.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	7.942.000,00	
				9.206.725.000,00					7.165.496.890,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Diskominfo sebagai Perangkat Daerah dengan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik. Oleh karena itu Diskominfo dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Pada saat ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kab.Pacitan yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan. Berikut tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 Kab.Pacitan

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kab.Pacitan

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian beberapa hal, termasuk kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata. Selain itu, juga fokus pada pengurangan kesenjangan digital, peningkatan akses informasi bagi masyarakat, serta perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi ke seluruh wilayah. Untuk mendukung pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika secara rinci ada beberapa sasaran, yaitu:

- a. Peningkatan Infrastruktur Digital;
- b. Peningkatan Literasi Digital
- c. Pengembangan Ekonomi Digital
- d. Penguatan Tata Kelola

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 akan berfokus pada ;

- a. Peningkatan Daya Saing Daerah; fokus pada pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.
- c. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; Peningkatan kesempatan berusaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar masyarakat.
- d. Pembangunan Berwawasan Lingkungan; Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan

pengembangan energi terbarukan.

- e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, serta program-program pengentasan kemiskinan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Recana kerja tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional maupun propinsi serta mengacu pada prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan. Tema Prioritas Ranwal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini adalah “ Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Keberdayaan Sosial”. Dari tema rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pacitan diatas telah ditentukan prioritas program Pembangunan meliputi :

1. Memperkuat kemandirian ekonomi local;
2. Menjaga dan meningkatkan daya beli dan pendapatan;
3. Penguatan industri olahan yang berpotensi ekspor;
4. Penguatan society 5.0 dalam partisipasi;
5. Memperkuat kemandirian sosial dan layanan dasar

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah mengacu pada :

1. Peraturan Daerah No.004 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Pacitan.
2. Peraturan Bupati No.74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No.144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam 1 sekretariat dan 3 bidang, yaitu bidang Informasi

dan Komunikasi, bidang Teknologi Informatika dan Persandian, bidang Statistik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Visi “ PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA dan BAHAGIA, dan Misi Bupati Pacitan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

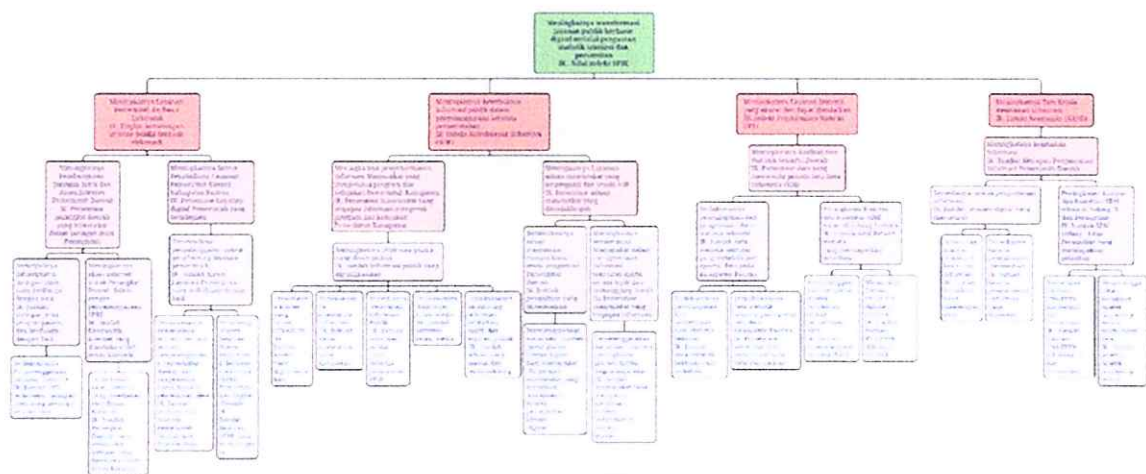
1. Pemberantasan Kemiskinan;
2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

Adapun misi yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah misi yang ke 4 yaitu “ **Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani**”. Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

“ Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian “

Dengan indikator tujuan adalah Indeks SPBE. Adapun Pohon Kinerja dan pohon kinerja Urusan Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 1
Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika



Sasaran **Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target 2026
1.	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian		Nilai indeks SPBE	3,55
2.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	94

		layanan pemerintahan		
3		Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	4,17
4		Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,42
5		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	234
6		Meningkatkan kualitas layanan tata kelola perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026, penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan bidang Informasi dan komunikasi, Statistic dan Persandian,serta mensukseskan target tujuannya

Maka untuk mencapai target tujuan Tahun 2026 melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada usulan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBHCHT. Rumusan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, terdiri dari 7 kegiatan dan sub kegiatan. Yang meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Relasi Media
 2. Pelayanan Informasi Publik
 3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 4. Diseminasi Informasi
 5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 6. Penyusunan Konten

4. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
- b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 3. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

**6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI**

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Disisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Selain rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dibutuhkan juga pendanaan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan untuk mendukung tercapainya kinerja pada Tahun 2026 sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan dengan kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 7.165.496.890.- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan sebagai berikut di tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pacitan

**RUMUSAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.165.496.890,00					5.932.725.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.165.496.890,00					5.932.725.000,00
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.946.233.899,00					5.257.725.000,00
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.069.563.269,00				-	1.492.725.000,00
	2 16 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13 Dokumen	51 500 300,00			-	13 Dokumen	0,00
	2 16 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	35 806 000,00	Kab Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	13 Dokumen	0,00
	2 16 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15 694 300,00	Kab Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	8 Laporan	0,00
	2 16 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2 911 235 160,00			-	59 Dokumen	7 725 000,00
	2 16 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2 845 596 960,00	Kab Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Orang/bulan	0,00
	2 16 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9 736 200,00	Kab Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	7 725 000,00
	2 16 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	57 Laporan	55 902 000,00	Kab Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Laporan	0,00

2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2.911.235.160,00			-	59 Dokumen	7.725.000,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.845.596.960,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	27 Orang/bulan	0,00
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.736.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2 Laporan	7.725.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57 Laporan	55.902.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	36 Laporan	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %	124.348.000,00			-	100 %	300.000.000,00
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	16.068.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Paket	50.000.000,00
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	108.280.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20 Dokumen	250.000.000,00

2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	225.436.369,00			-	100 %	340.000.000,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	57.975.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7 Paket	70.000.000,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.875.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Paket	35.000.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.775.669,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5 Paket	35.000.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.810.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	200.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	50.686.400,00			-	100 %	60.000.000,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.266.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Unit	10.000.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.420.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Unit	50.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	595.327.040,00			-	100 %	650.000.000,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.799.240,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	150.000.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.527.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Laporan	500.000.000,00

	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %	111.030.000,00			-	80 %	135.000.000,00
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	46.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17 Unit	60.000.000,00
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.880.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	26 Unit	15.000.000,00
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	52.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-	1.207.671.232,00			-	-	1.565.000.000,00
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1650 Informasi	1.207.671.232,00			-	1650 Informasi	1.565.000.000,00
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								

2.16.02.2.01.0014	Relasi Media								
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	850 Laporan	300.000.000,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik								
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	51.506.232,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	10 Permohonan	35.000.000,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	50.220.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Rekomendasi	30.000.000,00
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi								
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	201.945.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100 Persentase	500.000.000,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/fuknsi	36 Media	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	67 Media	400.000.000,00
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten								
		Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	204.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1650 Konten	300.000.000,00

3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	1.668.999.398,00			-	2.200.000.000,00
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Layanan	70.500.000,00			6 Layanan	100.000.000,00
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa							
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	70.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000,00
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	-	29 Perangkat Daerah	1.598.499.398,00			29 Perangkat Daerah	2.100.000.000,00
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE							
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	181.060.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	400.000.000,00
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							
			0	29 Perangkat Daerah	1.055.214.398,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29 Perangkat Daerah	1.500.000.000,00
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE							
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	362.225.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Aplikasi	200.000.000,00

	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			211.320.991,00					650.000.000,00
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	211.320.991,00				-	650.000.000,00
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	774 Data	211.320.991,00			-	774 Data	650.000.000,00
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional								
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia								
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90 %	111.320.991,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		350.000.000,00
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			7.942.000,00					25.000.000,00
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	7.942.000,00				-	25.000.000,00
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	7 Layanan	7.942.000,00			-	7 Layanan	25.000.000,00
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	7.942.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3 Perangkat Daerah	25.000.000,00
	J U M L A H				7.165.496.890,00					5.932.725.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai pelaksanaan atau penjabaran Renstra secara tahunan. Rencana Kerja Tahunan sangat penting karena keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Ke depan diharapkan Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengelolaan Statisti Sektoral serta pengelolaan urusan persandian di Pemerintah Daerah Kab.Pacitan

5.1 Catatan Penting

Hal – hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, kelompok sasaran, Lokasi pelaksanaan, sumber pendanaan dan kebutuhan pagu indikatif dilaksanakan sesuai situasi, kondisi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat,